



KEPENTINGAN DAN POSISI STRATEGIS INDONESIA DALAM PETA GEOPOLITIK INDO-PASIFIK

Asep Kamaluddin Nashir^{1*}

¹Department of International Relations; UPN Veteran Jakarta; Indonesia

*email: asepkamaluddin@upnvj.ac.id

Abstract

This writing aims to analyze the development of global geopolitics in the Indo-Pacific region. Furthermore, it focuses on analyzing Indonesia's maritime interests and strategic position in the region. Therefore, frameworks of geopolitical theory, international regimes, and maritime safety, security, and defense are needed as analytical tools. Findings in this writing explain that Indonesia has not yet directed its opportunities as an archipelagic state to enhance its role at the global level through the formation of international regimes to promote rules anchoring maritime safety, maritime security, and maritime defense despite the significant maritime interests in the Indo-Pacific. Moreover, developments in geopolitics in the region greatly influence Indonesia's maritime security. The results of this writing depict that maritime interests of archipelagic states must become a priority considering the geopolitical things have consequences in the maritime region for the future interests of the country.

Keywords: *Indonesia, Indo-Pacific, international regime, maritime safety and security*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan geopolitik global di Indo-Pasifik dengan fokus kepentingan maritim dan posisi strategis Indonesia di kawasan tersebut. Tulisan ini menggunakan teori geopolitik, rezim internasional, dan *maritime safety, security* dan *defense*. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif yang menekankan pada studi literatur atau dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa yang sudah berlalu berupa dokumen resmi pemerintah maupun buku, jurnal, laporan dan literatur lain terkait. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Indonesia belum mengarahkan peluangnya sebagai negara kepulauan untuk meningkatkan perannya di level global melalui pembentukan rezim internasional untuk mendorong aturan yang menyangkut *maritime safety, maritime security*, dan *maritime defence* meski kepentingan maritim di Indo-Pasifik sangat besar. Terlebih lagi perkembangan geopolitik di wilayah tersebut sangat mempengaruhi keamanan maritim Indonesia. Hasil dari tulisan ini menggambarkan bahwa kepentingan maritim negara kepulauan harus menjadi prioritas mengingat geopolitik di wilayah maritim berkonsekuensi besar bagi kepentingan negara di masa depan.

Kata Kunci: *Indonesia, Indo-Pasifik, rezim internasional, pertahanan dan keamanan maritim*

Pendahuluan

Implementasi agenda Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko Widodo sejak 2014 memberikan sumbangsih penting terhadap diskursus studi keamanan kontemporer, terutama dalam konteks keamanan maritim (Kusumawardhana, 2020: 1). Diketahui Indonesia memiliki berbagai manfaat sebagai poros maritim dunia seperti potensi ekonomi yang besar karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor maritim, termasuk di bidang perikanan, perkapalan, dan pariwisata bahari. Potensi ekonomi ini dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tulisan, dibahas tentang kontribusi dan keterlibatan Indonesia di Indo-Pasifik, terutama dalam bidang geopolitik. Tulisan Pedrason (2021) yang berjudul “Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi”, menjelaskan bahwa Indo-Pasifik merupakan wilayah maritim dengan tata letak yang strategis, baik sumber daya laut yang berada di bawahnya, maupun posisi strategis dalam mendukung berbagai kebijakan negara di maritim. Kondisi strategis juga tercermin pada wilayah tersebut yang menjadi bagian dari wilayah kedaulatan negara. Hal tersebut pada akhirnya menjelaskan kompleksitas interaksi antar negara. Terlebih lagi, kepentingan negara tidak terbatas pada eksplorasi sumber daya maritim, namun juga kontrol terhadap akses yang berkonsekuensi pada keuntungan politik dan ekonomi. Faktor kepentingan strategis tersebut kemudian mendorong dinamika pergeseran kekuatan yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan keamanan, terutama negara-negara yang memiliki kemampuan dan pengaruh dalam membentuk struktur keamanan di IndoPasifik.

Dalam tulisan lain oleh Permatasari dkk (2021) yang berjudul “Di Antara Tiga *Launchpad*: Indonesia dan Dinamika Diplomasi Antariksa dalam Geopolitik Indo-Pasifik” juga dijelaskan bahwa kerja sama dan kompetisi di bidang antariksa memengaruhi geopolitik Indo-Pasifik secara keseluruhan, baik pada sektor-sektor tradisional di permukaan bumi maupun matra antariksa sendiri. Posisi Indonesia yang dapat diterima oleh tiga negara *spacefaring* utama kawasan, Cina, Jepang, dan India, menghadirkan keuntungan dan tantangan tersendiri. Indonesia telah sukses menjaga jarak melalui strategi *limited engagement*, namun belum mampu memaksimalkan posisinya ini dengan strategi *omni-enmeshment* yang lebih cermat dan integratif. Diplomasi antariksa

menyediakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan peran geopolitiknya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyusun strategi diplomasi antariksa yang tepat berdasarkan modalitas dan perkembangan lingkungan strategis keantariksaan di kawasan Indo-Pasifik.

Berikutnya, buku yang ditulis oleh Ramsi dkk (2023) berjudul “*ASEAN Outlook On Indo-Pacific: Pespektif Pertahanan Indonesia*”, dijelaskan bahwa *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) sebagai strategi untuk menjembatani kepentingan semua negara di kawasan dan dampaknya bagi pertahanan Indonesia. Kerja sama pertahanan dalam dinamika geopolitik menjadi tema utama dalam perkembangan dinamika di Indo-Pasifik.

Mengacu pada beberapa tulisan di atas, maka posisi Indonesia sangat strategis dan memiliki akses teradap kepentingan nasional yang berkaitan erat dengan kawasan. Selain itu, peningkatan peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam hubungan internasional, terutama di bidang diplomasi dan perdagangan internasional. Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di seluruh dunia, dan meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam berbagai forum internasional (Ramadhan, 2023: 263). Hal itu sesuai dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan dan perkembangan geopolitik di Indo-Pasifik. Di sisi lain, kepentingan strategis Indonesia di wilayah maritim dan Indo-Pasifik sangat besar. Karena itu, Indonesia harus lebih memainkan perannya di kancah internasional terkait keamanan dan kepentingan maritim, terutama di Indo-Pasifik.

Bahkan, dalam konteks internasional, secara strategis, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, dan negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia sering kali kurang mendapat perhatian. Tidak dapat disangkal bahwa negara dengan lebih dari 18.000 pulau (6.000 di antaranya berpenghuni) memainkan peran yang semakin penting di antara negara-negara Indo-Pasifik dan negara-negara berkembang. Amerika Serikat (AS) mengakui hal ini dan tentu saja berebut posisi dengan Cina. Kebijakan AS di Indo-Pasifik tidak akan masuk akal tanpa hubungan yang kuat dengan negara yang terletak di jantung geografis kawasan tersebut (Myers, 2023).

Ketika Amerika Serikat terus mengalihkan perhatiannya ke Indo-Pasifik, negara tersebut tidak dapat mengabaikan Indonesia, yang merupakan pusat geografis kawasan

ini. Kerja kebijakan yang cekatan diperlukan untuk memaksimalkan nilai dan peran Indonesia di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Secara khusus, perluasan keterlibatan ekonomi dan pemahaman bahwa Indonesia akan melakukan perjalanan ke Cina jika tidak ada perhatian dari Amerika Serikat adalah hal yang sangat penting. Mengakui batasan tersebut juga memerlukan pemahaman mengenai lindung nilai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan Washington tidak boleh mengharapkan pemerintah Indonesia untuk bertindak seperti sekutu dan mitra Amerika Serikat yang lebih dekat. Meskipun demikian, dalam isu-isu seperti AUKUS yang memungkinkan adanya alasan kuat untuk melanjutkan masalah ini terlepas dari kekhawatiran di Asia Tenggara, Washington dapat yakin bahwa landasan dalam hubungan AS-Indonesia masih cukup tinggi untuk bertahan dari tantangan-tantangan sementara ini. Jika Amerika Serikat dapat mengalibrasi pendekatannya terhadap Indonesia untuk memastikan bahwa Amerika Serikat menjadi lebih menarik sebagai mitra ekonomi dibandingkan Cina dalam jangka panjang, maka dapat dipastikan bahwa Indonesia akan memainkan peran yang sangat diperlukan dalam upaya yang lebih luas untuk memastikan Indonesia yang bebas dan terbuka (Myers, 2023).

Melihat situasi tersebut, penting bagi Indonesia untuk berperan dalam mendorong pentingnya *maritime safety*, *maritime security*, dan *maritime defense* mengingat pergeseran geopolitik di kawasan tersebut akan sangat mempengaruhi kepentingan maritim Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan maritim Indonesia. Karena itu, tulisan ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan geopolitik global di Indo-Pasifik. Lebih lanjut, tulisan ini diarahkan untuk menganalisis kepentingan maritim dan posisi strategis Indonesia di kawasan tersebut melalui pembentukan rezim internasional.

Kerangka Konseptual ***Pertahanan dan Keamanan Maritim***

Dalam perkembangan terkini, fungsi maritim lebih dari sekedar eksploitasi sumber daya laut, namun lebih memiliki nilai strategis baik negara dengan status negara maritim maupun untuk kepentingan global. Fungsi maritim sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan global.

Setiap negara maritim perlu menyadari tiga fungsi maritim, yaitu: *maritim safety*, *maritime security*, dan *maritim defence*. *Maritime safety* menyangkut lingkungan maritim

yang terbebas dari polusi kapal di mana di level nasional, setiap negara perlu untuk merumuskan kebijakan dan kerangka hukum. Di level regional dan global, dibutuhkan infrastruktur navigasi yang mendukung operasional pelayanan maritim, seperti klasifikasi kapal, bantuan pelayanan navigasi, pencarian dan penyelamatan, dan pelayanan perlindungan lingkungan laut, serta pelayanan pemberantasan pencemaran lingkungan, dan lainnya (Urbanski, 2009: 11).

Sementara itu, *maritime security* terkait dengan keamanan maritim dari gangguan terorisme, pembajakan, eksploitasi ilegal sumber daya laut, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, manusia dan senjata. Karena itu *maritime security* menekankan pada langkah organisasi nasional terkait operasi dalam menjamin keamanan, seperti *coast guard*, polisi maritim, *customs service*, dan lembaga terkait lainnya (Urbanski, 2009: 11).

Sedangkan *maritime defence* menjelaskan tentang peran pertahanan negara dalam menjaga teritorial di laut, menjaga keamanan pertahanan di *sea lines of communication* dan *national maritime assets*. Intinya terletak pada pengerahan *naval forces* dengan dilengkapi berbagai jenis kapal dan pesawat tempur, pesawat terbang, serta *Autonomous Air Vehicle* (UAV) dan *Autonomous Underwater Vehicles* (AUV) dan lainnya (Urbanski, 2009: 12).

Kawasan ekonomi, politik, militer, dan sosial baru yang berkembang pesat, seperti Uni Eropa, Cina, India, dan Brasil, dengan sangat cepat mengubah situasi dunia yang ada sebelumnya. Wilayah geografis dunia baru ini juga mengakibatkan menurunnya peran Amerika Serikat tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek politik dan militer. Amerika Serikat juga perlahan-lahan kehilangan peran mereka sebagai kekuatan militer dan laut dunia (Urbanski, 2009: 13).

Proses globalisasi yang semakin cepat juga tercermin dalam pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional dan transportasi melalui laut. Perekonomian dunia saling berhubungan erat. Selama empat dekade terakhir, total perdagangan melalui laut meningkat lebih dari empat kali lipat. 90% perdagangan dunia dan dua pertiga minyak bumi diangkut melalui laut. Jalur laut dan infrastruktur pendukung pantai merupakan jalur kehidupan perekonomian global modern. Mereka adalah simbol yang terlihat namun sangat rentan dalam strategi distribusi modern (Urbanski, 2009: 13).

Bagi negara-negara anggota Uni Eropa, kriteria utama distribusi wilayah realisasi fungsi keselamatan, keamanan dan pertahanan maritim antara layanan maritim utama,

merupakan lokasi geografis wilayah realisasi menuju pantainya sendiri: (Urbanski, 2009: 13)

1. Di wilayah yang dekat dengan pantai sendiri, fungsi keamanan maritim dan pertahanan maritim telah dilaksanakan oleh penjaga pantai dan dinas keamanan lainnya, serta angkatan laut;
2. Di daerah-daerah yang letaknya jauh dari pantai sendiri, fungsi keamanan laut dan pertahanan laut telah dilaksanakan oleh angkatan laut, terutama dalam bentuk operasi keamanan laut.

Amerika Serikat mendefinisikan Area Misi Kritis dari fungsi ini sebagai berikut: (*National Homeland Strategy*, 2022).

1. Intelijen dan peringatan;
2. Keamanan perbatasan dan transportasi;
3. Kontraterorisme dalam negeri;
4. Melindungi infrastruktur penting dan aset-aset utama;
5. Pertahanan terhadap ancaman bencana;
6. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Dengan perkembangan maritim yang begitu dinamis, peran negara maritim seharusnya tidak hanya pada level nasional dalam menyiapkan *maritime safety*, *security*, dan *defence*. Lebih dari itu, negara maritim justru harus lebih aktif dalam mendorong pentingnya kerja sama terutama dalam *maritime safety* dan *security* mengingat kedua bidang tersebut melibatkan semua negara yang bergantung pada wilayah maritim untuk berbagai kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan.

Diperlukan keteraturan dalam level internasional untuk menciptakan *maritime safety* dan *maritime security* secara global. Aturan, regulasi, norma, dan prinsip-prinsip diperlukan untuk menjadi panduan dalam transaksi antar pemerintah (negara) sekaligus solusi dari permasalahan atau isu yang mempengaruhi banyak negara. Diperlukan rezim yang terinstitusionalis mengingat wilayah maritim, baik *maritime safety* dan *maritime security* melibatkan hampir seluruh negara di dunia dan mencakup banyak bidang dalam kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan negara-negara di dunia.

Karena itu, negara maritim memiliki tanggung jawab dalam mendorong lahirnya rezim internasional di bidang maritim untuk mendorong berbagai aturan atau kerja sama rezim internasional mengingat kepentingan negara, terutama negara maritim sangat

terkait erat dengan berbagai persoalan maritim, terutama dari sisi keamanan dan pertahanan maritim.

Rezim Internasional

Rezim kerja sama internasional meliputi: (Holsti, 1992: 385-387)

1. Setting Standard

Banyak perjanjian bilateral, regional, dan multilateral menetapkan tingkat atau target di mana kerja sama internasional untuk tujuan penetapan standar akan menunjukkan sejauh mana suatu rezim bergantung pada kolaborasi dan penelitian ilmiah. Penetapan standar internasional mulai mencakup banyak bidang aktivitas manusia.

2. Obligations

Banyak rezim menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah dalam keadaan tertentu.

3. Allocations

Sebagian besar sumber daya terbatas. Jika eksploitasi tidak dibatasi maka spesies akan punah. Oleh karena itu, banyak perjanjian dan beberapa lembaga dirancang untuk mengalokasikan bagian sumber daya.

4. Prohibitions

Larangan adalah semacam penetapan standar. Mereka sepenuhnya melarang jenis aktivitas tertentu.

Karena itu, rezim internasional biasanya merupakan ciptaan pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut dibangun melalui kajian ilmiah, tawar-menawar diplomatik yang melibatkan alokasi biaya dan imbalan, serta pemantauan untuk mengamati tingkat kepatuhan. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam membantu meluncurkan bentuk-bentuk regulasi internasional yang baru. Kelompok kepentingan, koalisi transnasional, dan individu melobi pemerintah untuk menyelesaikan beberapa masalah internasional (Holsti, 1992: 388).

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif (Sugiyono, 2015: 209) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. Subjek penelitian merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2015: 216).

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh penulis, yaitu studi literatur atau dokumentasi. dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini berbentuk dokumen resmi pemerintah maupun buku, jurnal, laporan dan literatur lain terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003: 70), yaitu sebagai berikut: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Struktur Geopolitik: Bentuk dan Pola Perubahan

Analisis geopolitik tidak memprediksi waktu terjadinya peristiwa, krisis, dan titik poin yang memaksa perubahan radikal pada peta geopolitik. Peristiwa tersebut adalah invasi mendadak ke Korea Selatan oleh Korea Utara dan pemberontakan rakyat yang menggulingkan rezim Ben Ali di Tunisia, sebagai awal Musim Semi Arab. Analisis seperti ini dapat memusatkan perhatian para pembuat kebijakan pada kondisi-kondisi

yang mungkin membawa perubahan geopolitik. Misalnya, upaya pemberontakan di Bahrain, yang berhasil digagalkan oleh Arab Saudi, dipicu oleh *Arab Spring* (Cohen, 2015: 1).

Perubahan keseimbangan dalam sistem internasional juga dapat diantisipasi melalui analisis geopolitik. Amerika Serikat, bersama dengan sekutu NATO-nya, mempunyai keberhasilan militer awal dalam mengusir Taliban dari Afghanistan dan dua tahun kemudian melancarkan perang melawan Irak, menggulingkan rezim Saddam Hussein. Namun, Amerika Serikat segera terjebak dalam perang gerilya yang memakan banyak biaya dan berlanjut hingga dekade berikutnya. Sementara itu, Cina mengalami kemajuan pesat sebagai raksasa ekonomi (Cohen, 2015: 1).

Geografi adalah studi tentang ciri-ciri dan pola yang dibentuk oleh interaksi lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Contoh hubungan ciri/pola sederhana adalah ngarai yang dikangkangi oleh jembatan yang merupakan jalur transit. Pentingnya kedekatan geografis dalam melancarkan perang dan melakukan perdagangan tercermin dalam banyak hal. Tempat peluncuran drone Amerika ditempatkan di Djibouti untuk menyerang al-Qaeda di Yaman, dan Perancis telah mengembangkan tempat serupa di Niger untuk operasinya melawan teroris di Mali Utara. Bentang alam gurun yang kosong berfungsi sebagai lokasi pangkalan eksplorasi ruang angkasa, seperti halnya Kosmodrom Baikonur Rusia di Kazakhstan utara. Gurun barat daya AS adalah tempat utama latihan pilot militer (Cohen, 2015: 4-5).

Perspektif geopolitik bersifat dinamis. Ia berkembang seiring dengan perubahan sistem internasional dan lingkungan operasionalnya. Sifat dinamis dari kondisi geografis, sebagian besar, menyebabkan perubahan pola dan fitur geopolitik. Keadaan ini berubah sebagai respons terhadap fenomena seperti penemuan atau penipisan sumber daya alam, pergerakan manusia dan arus modal, serta perubahan iklim jangka panjang. Dengan demikian, peralihan dari lanskap pedesaan ke perkotaan atau dari perekonomian manufaktur ke perekonomian jasa mewakili perubahan geografis yang tercermin dalam perubahan cita-cita dan tujuan nasional (Cohen, 2015: 5).

Dinamisme geografis juga mempengaruhi perubahan pandangan nasional dan regional di Eropa Maritim serta di Korea Selatan dan Taiwan. Dalam kasus terakhir, *outsourcing* manufaktur secara besar-besaran ke pantai selatan dan tengah daratan Cina telah menekan Taipei dan Seoul, serta Tokyo dan Washington, untuk berhati-hati dalam

hubungan diplomatik mereka dengan Cina. Sebaliknya, Cina telah dipaksa oleh perubahan kondisi geografis “*Golden Coast*” yang berteknologi tinggi untuk membuka diri terhadap dunia luar. Pemerintah juga terpaksa fokus pada pengembangan wilayah pedesaan dan memberikan hak yang lebih besar kepada pekerja sementara yang tertarik pada peluang kerja di kota. Pada saat yang sama, Amerika Serikat harus memainkan peran diplomatik yang rumit dalam upaya mengekang tindakan agresif Cina atas penguasaan Laut Cina Timur dan Selatan.

Terkait dengan Indonesia, terdapat beberapa poin yang harus dipahami, terutama para pengambil kebijakan, yaitu perubahan peta geopolitik atau perubahan pola dan bentuk interaksi geopolitik yang disebabkan oleh sumber daya alam, ekonomi (jalur transportasi perdagangan), dan terutama perubahan kepentingan nasional, baik kontrol, faktor geografis dan kepentingan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Geoffrey & Gray (1999) bahwa “*political objectives are a consequence of choices made by policymakers. It is from these choices that political and strategic importance is attached to geographical configurations and locations*”. Dengan kata lain, peta geopolitik Indo-Pasifik harus dapat dipahami sesuai dengan kepentingan Indonesia mengingat posisi Indonesia sangat strategis di wilayah tersebut.

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis Indonesia sebagai salah satu aktor dalam politik internasional. Analisa mengenai Indonesia dengan status negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982 dan posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik, dan kemampuan Indonesia dalam berbagai mediasi konflik menjadi alasan strategis untuk menganalisis perkembangan geopolitik di Indo-Pasifik dan bagaimana seharusnya Indonesia dapat menjadi negara yang berperan besar untuk mendorong pembentukan rezim kerja sama untuk merumuskan pentingnya aturan, institusi, dan norma di wilayah Indo-Pasifik untuk menciptakan kegiatan maritim yang berdasarkan *maritime safety*, *maritime security*, dan *maritime defence*. Keteraturan dalam kerangka rezim kerja sama multilateral untuk menjaga *safety*, *security*, dan *defence* di Indo-Pasifik sangat penting mengingat perkembangan geopolitik di wilayah maritim sangat memengaruhi kestabilan kegiatan ekonomi, politik, dan keamanan.

Perkembangan dan Dinamika Geopolitik: Pola dan Struktur

Perkembangan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik menggambarkan interaksi persaingan, kerja sama, ekonomi, respons kebijakan dan persoalan keamanan dan potensi konflik. Hal yang menariknya adalah Indo-Pasifik menjadi magnet bagi setiap aktor untuk terlibat dan saling melihat, bereaksi dan merespons situasi yang berkembang di wilayah tersebut.

Gagasan mengenai “Indo-Pasifik” (IP) sebagai sebuah konstruksi regional telah memperoleh daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sebagian karena penerapannya dalam strategi inti Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka atau *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) dari Amerika Serikat dan Jepang. Penerapan istilah ini secara terus-menerus oleh para pembuat kebijakan, analis, dan pakar telah semakin memperkuat keunggulan istilah ini dalam wacana keamanan regional. Sebagai konsekuensinya, semua negara yang memiliki kepentingan besar di kawasan “baru” ini merasa terdorong untuk terlibat dengan konsep tersebut dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menerima atau bereaksi terhadap konsep tersebut (Wilkins, 2020: 1).

Singkatnya, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India, bersama dengan Inggris dan Perancis, merupakan pendukung istilah ini dan kini telah menjadi bagian integral dari strategi regional mereka (misalnya FOIP). Cina dan Rusia dengan tegas menolak label tersebut, dan memandangnya, dengan beberapa pembenaran, sebagai sebuah konstruksi strategis yang melaluinya kekuatan demokrasi Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India, yang berpotensi secara bersama-sama (melalui proses “Quad-plus”), akan maju. kepentingan nasional mereka dengan mengorbankan Cina dan Moskow. "Indo-Pasifik" telah bergeser dari konstruksi geografis menjadi arena persaingan yang semakin meningkat—dan label untuk strategi AS. Hal ini menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) – sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh negara kecil dan menengah yang menggambarkan diri mereka sebagai “Komunitas Keamanan” – dalam keadaan sulit, terjebak di antara dua posisi yang dipimpin Amerika dan Cina yang bersaing di atas. Posisinya yang tidak nyaman berada di tengah-tengah dua blok kekuasaan yang tidak jelas ini memberikan tekanan pada organisasi tersebut, yang telah lama bangga akan “sentralitasnya” dalam arsitektur keamanan kawasan, karena banyaknya lembaga multilateral yang dimilikinya, (diberi label “ASEAN-Plus”) (Wilkins, 2020: 1-2).

Seiring dengan evolusi yang berkelanjutan di Asia-Pasifik, bagian ‘Indo’ di Indo-Pasifik mulai tumbuh lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Modi, India ingin lebih terlibat dengan negara demokrasi Asia lainnya seperti Jepang dan Australia. Promosi bersama Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika oleh India dan Jepang menandai upaya untuk memberikan alternatif di Afrika selain Cina, yang telah memimpin dalam pembiayaan proyek-proyek industri dan infrastruktur. Asia juga masih bergantung pada Timur Tengah untuk sebagian besar kebutuhan energinya. Namun, seiring dengan berkurangnya ketergantungan AS pada energi Timur Tengah, alasan keterlibatan Amerika dalam bidang keamanan di sana pun semakin berkurang. Kebutuhan untuk mempertahankan pasokan energi yang stabil mungkin akan menarik minat Asia untuk lebih tertarik ke wilayah barat melintasi Samudera Hindia (Cainey, 2020).

Sejak lama, negara-negara Asia menganut kerangka geopolitik yang stabil, sementara mereka mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Saat ini kerangka kerja tersebut masih berubah-ubah, karena Cina mengambil peran yang lebih kuat di kawasan ini dan peran Amerika Serikat tampaknya kurang jelas. Diplomasi ekonomi Cina, yang menghubungkan seluruh elemen kebijakan luar negeri, mendorong negara-negara lain untuk bereaksi. Sejauh mana inisiatif baru Indo-Pasifik ini akan mengubah arus perdagangan Asia serta standar dan norma perdagangan internasional yang sejalan dengan hal ini akan menjadi jelas di tahun-tahun mendatang (Cainey, 2020).

Ketika ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Cina mengganggu Asia, kerangka analitis baru telah mendapat perhatian dalam studi geopolitik regional: Indo-Pasifik (IP). Sebagaimana dirumuskan sejauh ini, IP merupakan konsep yang menantang untuk memahami politik dan keamanan di Asia karena setidaknya tiga alasan. Pertama, dari sudut pandang geografis, hal ini agak ambigu karena mencakup wilayah yang sangat luas dan jumlah negara yang masih belum jelas. Menggabungkan dua wilayah geografis – wilayah Samudera Hindia dan wilayah Samudera Pasifik – konsep ini telah menjadi sasaran kritik keras karena dianggap dangkal dan tidak berguna untuk studi politik regional. Kedua, ini mencakup negara-negara yang mungkin tidak memiliki pola sejarah persahabatan atau permusuhan seperti India dan Jepang. Karena risiko terseret ke dalam perang dengan tetangga, baik dalam teori geopolitik maupun hubungan internasional, merupakan bahaya paling mendesak bagi keamanan nasional negara-negara dan dengan demikian merupakan faktor penentu utama kebijakan luar negeri

mereka. Dua negara yang berjauhan dan tidak mengancam satu sama lain tidak mungkin memengaruhi perilaku internasional satu sama lain. Terakhir, saat ini konsep tersebut sarat dengan muatan politis yang mencerminkan upaya berbagai aktor untuk menyatukan dua lingkungan keamanan untuk tujuan strategis tertentu. IP adalah produk dari sistem regional yang semakin multipolar di mana kebangkitan Cina muncul sebagai mesin utama persaingan dan faktor pendorong utama di balik penyelarasan atau pembatasan negara-negara di kawasan (Pelaggi & Termine, 2023: 29).

Memang benar, hal ini memicu perdebatan sengit mengenai “Asia-Pasifik” versus “Indo-Pasifik” sebagai deskripsi regional yang saling bersaing. Menariknya, pada waktu yang hampir bersamaan, pada pertemuan KTT ASEAN di Bangkok, 23 Juni 2019, dilakukan upaya untuk menyatakan posisi kolektif mengenai Indo-Pasifik – yang menghasilkan penerbitan “*ASEAN Outlook on the Indo Pacific*” (AOIP). Khususnya, menjelang hal ini, Indonesia telah menjadi pendukung kuat penerapan dan operasionalisasi konsep tersebut, dan Anwar menegaskan bahwa 'Indonesia telah mengambil peran utama dalam mendorong ASEAN untuk mengambil bagian aktif dalam wacana mengenai hal baru ini. Konsep strategis 'Indo-Pasifik' (Wilkins, 2020: 2).

Sukma menegaskan ‘Dilihat dari sudut pandang ini, penerimaan Indonesia terhadap gagasan Indo-Pasifik merupakan operasionalisasi kebijakan luar negeri dari visi maritim nasional. Sukma berargumen, ‘Mereka berharap bahwa visi ini akan mendamaikan visi-visi tatanan regional yang bersaing yang didukung oleh negara-negara besar. Dengan mengadopsi *Outlook* ini, ASEAN jelas ingin mengingatkan dirinya sendiri, dan mengirimkan pesan sederhana kepada negara-negara di luar kawasan, bahwa sentralitas ASEAN tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, Sukma berpendapat bahwa ‘masuk akal untuk berharap bahwa Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan bahwa AOIP (*ASEAN Outlook on the Indo Pacific*) melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai satu-satunya negara yang benar-benar berada di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik di Asia Tenggara, Indonesia telah melakukan upaya berulang kali untuk memotivasi mitra-mitranya di ASEAN, namun sejauh ini hanya sedikit keberhasilan yang dicapai (Wilkins, 2020: 2).

Peluang Indonesia dalam Membentuk Rezim di Indo-Pasifik

Dalam politik internasional, terutama dalam mendorong kerja sama dan penyelesaian konflik regional dan global, Indonesia turut berperan dalam menyelesaikan konflik di

Kamboja dengan mensponsori Indonesia *Informal Meeting* (JIM I) pada bulan Juli 1988. Kegiatan ini berhasil mencapai kesepakatan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, serta berupaya mencegah rezim Pol Pot yang merugikan rakyat Kamboja. Selain itu, peran Indonesia dalam PBB menjadi salah satu pelopor Gerakan Non Blok, sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara netral yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Gerakan ini bertujuan meredakan ketegangan dunia, terutama pada masa perang dingin antara Blok Barat dan Timur. Selanjutnya, Indonesia menjadi co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, motivator, dan justifikator dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. Upaya ini mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Timur-Tengah (Sari, 2023). Dengan kata lain, Indonesia memiliki dasar kebijakan dan pengalaman menyangkut motivasi Indonesia dalam mendorong kestabilan politik internasional.

Sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982 dan posisi geografis Indonesia yang strategis di Indo-Pasifik dan peran strategis Indonesia di forum-forum internasional dan regional seperti ASEAN telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengaruh dalam mendorong terciptanya *maritime safety*, *maritime security* dan *maritime defence*.

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Junef, 2017: 375). Adapun garis pantai sepanjang 95.181 km² dan terletak pada posisi yang strategis diapit oleh Benua Asia dengan Benua Australia dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang ke-7 membangkitkan kembali semangat kemaritiman kepada bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo memiliki tekad untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dengan mengusung konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan Poros Maritim Dunia memuat lima pilar utamanya yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Sanjiwani, 2022: 67).

Diplomasi Maritim Kooperatif ini merupakan cerminan dari sinergi dan kerja sama yang baik dan sigap, serta adanya sikap saling percaya antara TNI Angkatan Laut dengan

pihak angkatan laut Malaysia dan Filipina. Kerja sama patroli maritim trilateral ini telah mendukung dan meningkatkan kapabilitas TNI Angkatan Laut dalam mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi.

Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama ini tentunya didukung oleh pihak angkatan laut Malaysia dan Filipina yang memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan berperan penting dalam melengkapi kapabilitas pengamanan TNI Angkatan Laut yang belum memadai untuk meredam kawasan perairan tersebut dari aksi pembajakan kapal (Sanjiwani, 2022: 78).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa diplomasi keamanan maritim harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerja sama secara optimal. Sementara itu, untuk mengetahui identifikasi peluang kerja sama dengan negara lain, terlebih dahulu Indonesia perlu mengetahui kebutuhan keamanan maritim nasionalnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan isu dan ancaman keamanan maritim apa saja yang menjadi prioritas nasional dan kapasitas nasional apa saja yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, hal tersebut dapat mempermudah pelaksanaan diplomasi di kawasan dan internasional (Pusat P2K-01, 2016: 65).

Bagi Indonesia, peningkatan kerja sama bidang keamanan maritim di kawasan merupakan bagian vital dari upaya untuk menjamin keamanan maritim nasional. Terwujudnya keamanan maritim kawasan akan sangat menentukan terpeliharanya keamanan maritim nasional. Oleh sebab itu, Indonesia telah berupaya untuk memanfaatkan berbagai inisiatif regional seperti *Regional Conference on the Establishment of Regional Convention against IUU Fishing*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Indian Ocean Rim Association (IORA)* (Pusat P2K-01, 2016: 80-83).

Di tingkat multilateral, diplomasi maritim dapat dilakukan di forum-forum multilateral dan organisasi internasional. Diplomasi Indonesia dalam bidang keamanan maritim di tingkat multilateral berfokus pada *norm-setting* dan upaya Indonesia untuk mengarusutamakan isu-isu kejahatan transnasional di laut, khususnya pada forum PBB, dalam hal ini termasuk berbagai forum dan mekanisme yang dibentuk di bawah kerangka *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Forum dalam kerangka UNTOC ini menjadi vital bagi Indonesia mengingat UNTOC adalah instrumen internasional utama yang menjadi dasar bagi kerja sama internasional dalam

penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Beberapa contoh keterlibatan Indonesia dalam pengarusutamaan isu kejahatan transnasional di laut adalah peran aktif Indonesia dalam forum *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *International Maritime Organization* (IMO), dan Bali Process. Hal ini merupakan bentuk upaya sekuritisasi Indonesia agar negara-negara lain turut memandang bahwa kejahatan transnasional merupakan salah satu ancaman keamanan yang penting untuk segera ditangani (Pusat P2K-01, 2016: 86).

Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. hal ini di masa lalu telah dibuktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika di masa kini melalui '*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*' yang digagas oleh Indonesia (Setnas ASEAN, 2020).

Contoh nyata diplomasi Indonesia yang membumi di era Kabinet Kerja adalah ketika di saat masyarakat dunia sedang mengalami distorsi, antara lain dari ancaman perang dagang dan stabilitas kawasan Laut China Selatan. *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* lahir sebagai wujud perhatian negara anggota ASEAN atas situasi global. Inisiatif Indonesia dalam menelurkan konsep Indo-Pasifik adalah implementasi diplomasi Indonesia yang bebas aktif dan senantiasa berupaya mewujudkan inisiatif perdamaian, sebanding dengan Deklarasi Djuanda yang lahir tahun 1957 dan peran Indonesia pada perumusan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 saat perang dingin sedang berlangsung (kemlu.go.id, 2019).

Indonesia secara geografis mempunyai letak yang strategis antara persilangan dua samudera dengan dua benua, sehingga wilayah laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi jalur perdagangan dunia dan lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Ini berarti Indonesia berfungsi sebagai *the global supply chain system* dengan posisi geografis tersebut. Posisi ini juga menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai *centre of gravity* (Kartika, 2014: 144).

Indonesia dengan posisi dan potensi tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi negara maritim yang berbasis sumber daya alam. Potensi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan dapat mengganggu stabilitas keamanan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Ini disebabkan posisi Indonesia sangat terbuka bagi negara lain untuk memasuki wilayah Indonesia melalui laut dan melakukan aktivitas di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkan, sehingga negara perlu memperhatikan kondisi keamanan maritimnya.

Keamanan maritim negeri ini juga dipengaruhi oleh geopolitik Indonesia. Posisi Indonesia ini tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternal, baik lingkungan nasional, lingkungan regional, maupun lingkungan global dengan segala bentuk tantangan di dalamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari konstelasi geopolitik global, lingkungan geopolitik regional, dan lingkungan strategis nasional. Kondisi geopolitik ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan negara (Kartika, 2014: 145). Di sisi lain, terkait Indo-Pasifik, di mana Indonesia secara strategis berada di tengah-tengah dua benua tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia.

Sementara itu, maritim dipahami oleh banyak pihak sebatas pada bidang pelayaran dan industri pendukungnya, yang merujuk pada tiga poin, yaitu *relating to adjacent to sea, relating to marine shipping or navigation, and resembling a mariner*. Ketiga poin tersebut tidak dapat dipisahkan dari asas hukum laut, yaitu *res nullius* dan *res communis*. Menurut Djalal, terdapat pertarungan di antara kedua asas hukum laut itu, yaitu: (Kartika, 2014: 147).

1. Asas *res nullius* mengatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara yang menginginkannya; sedangkan
2. Asas *res communis* mengatakan bahwa laut itu milik bersama masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara.

Karena itu, penting bagi Indonesia untuk lebih gencar menjalankan diplomasi maritim untuk mendorong terbentuknya rezim internasional di mana Indonesia menjadi negara yang harus lebih aktif dan berperan mengingat keamanan maritim dan ekonomi maritim, serta peluang agar dapat menjadi negara yang lebih memainkan perannya di level global. Diplomasi maritim Indonesia harus segera dilakukan untuk mendorong terbentuknya rezim internasional yang menjadi regulasi dalam mengatur perilaku setiap negara di Indo-Pasifik. Adapun langkah Indonesia dalam membentuk rezim internasional harus memuat upaya untuk mendorong:

1. Terbentuknya kerja sama multilateral

2. Menentukan aturan dan norma yang dipatuhi negara dalam menjalankan dan menciptakan keamanan maritim dan keamanan global
3. Merumuskan berbagai kewajiban setiap negara untuk mendukung pengembangan infrastruktur maritim untuk mendukung navigasi, kerja sama *coast guard*, dan mencegah eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan.
4. Menentukan aturan untuk pelarangan aktivitas yang merugikan *maritim safety* dan *maritime security*.

Karena itu, langkah diplomasi maritim Indonesia yang sudah dilakukan, harus lebih ditingkatkan intensitasnya serta ditujukan untuk mendorong terbentuknya rezim internasional untuk *maritim safety* dan *security* di Indo-Pasifik, terutama dalam forum PBB, serta melibatkan berbagai LSM (*non-state actors*), mendorong terbentuknya koalisi transnasional, dan setiap pemerintahan/negara yang memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan maritim global mengingat kestabilan Indo-Pasifik sangat mempengaruhi ekonomi, politik, dan keamanan setiap negara, terutama dalam aktivitas geopolitik di maritim.

Simpulan

Mengacu pada pembahasan di atas, maka peran Indonesia dalam dinamika geopolitik di Indo-Pasifik melalui pembentukan rezim atau aturan untuk pengelolaan konflik sangat mempengaruhi kepentingan strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982, posisi geografis Indonesia yang strategis di Indo-Pasifik, serta peran strategis Indonesia di forum-forum internasional dan regional seperti ASEAN telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengaruh dalam mendorong terciptanya *maritime safety*, *maritime security* dan *maritime defence*.

Karena itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa diplomasi keamanan maritim harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang kerja sama secara optimal. Sementara itu, untuk mengetahui identifikasi peluang kerja sama dengan negara lain, terlebih dahulu Indonesia perlu mengetahui kebutuhan keamanan maritim nasionalnya sendiri.

Sebagai contoh, Indonesia telah berupaya untuk memanfaatkan berbagai inisiatif regional seperti *Regional Conference on the Establishment of Regional Convention against IUU Fishing*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Maritime Forum (AMF)*,

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Di tingkat multilateral, diplomasi maritim dapat dilakukan di forum-forum multilateral dan organisasi internasional. Diplomasi Indonesia dalam bidang keamanan maritim di tingkat multilateral berfokus pada *norm-setting* dan upaya Indonesia untuk mengarusutamakan isu-isu kejahatan transnasional di laut, khususnya pada forum PBB, dalam hal ini termasuk berbagai forum dan mekanisme yang dibentuk di bawah kerangka *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Karena itu, penting bagi Indonesia untuk lebih gencar menjalankan diplomasi maritim untuk mendorong terbentuknya rezim internasional di mana Indonesia menjadi negara yang harus lebih aktif dan berperan mengingat keamanan maritim dan ekonomi maritim, serta peluang agar dapat menjadi negara yang lebih memainkan perannya di level global.

Daftar Pustaka

- Cainey, A. (2020) "The Geopolitics of Indo-Pacific Trade," diakses melalui <https://rusi.org/explore-our-research/publications/conference-reports/geopolitics-indo-pacific-trade>
- Cohen, S. B. (2015) *Geopolitics: The Geography of International Relations*, London: Rowman & Littlefield.
- Geoffrey, S. & Gray, C. S. (1999) "Why Geopolitics?," *Journal of Strategic Studies*, 22:2,1-11.
- Holsti, K. J. (1992) *International Politics: A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice Hall.
- Kartika, S. D. (2014) "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum," *Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, November.
- Kemlu.go.id (2019) "Peran Sentral Indonesia pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific," diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/berita/peran-sentral-indonesia-pada-asean-outlook-on-indo-pacific>
- Kusumawardhana, I. (2020) "Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara," *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni).
- Myers, L. (2023) "Indonesia Should Be At the Heart of US Indo-Pacific Policy," diakses melalui <https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/when-goods-cross-borders/indonesia-should-be-at-the-heart-of-us-indo-pacific-policy>
- Pedrasan, R. (2021) "Indo-Pasifik dalam Perspektif Geopolitik dan Geostrategi," *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Vol. 7, No. 1, pp. 88-95.
- Pelaggi, S. & Termine, L. (2023) *Understanding the Indo-Pacific: Geopolitical Context*, dalam Kratiuk, Barbara. *Handbook of Indo-Pacific Studies*, Routledge: London.
- Permatasari, Y., dkk (2021) "Di Antara Tiga Launchpad: Indonesia dan Dinamika Diplomasi Antariksa Dalam Geopolitik Indo-Pasifik," *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 6, No. 1, November.

- Pusat P2K-01 (2016) *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri*,” Kajian Mandiri, *Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri*.
- Ramadhan, F. V. (2023) “Peluang dan Tantangan Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia: Perspektif Politik Internasional,” *Tuturan: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, Agustus.
- Ramsi, O. dkk (2023) *ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Perspektif Pertahanan Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama.
- Sanjiwani, N. O. A. (2022) “Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia,” *IJGD: Indonesia Journal of Global Discourse*, Vol. 4, Ed. 1, Pages 66-85, January-June.
- Sari, A. M. (2023) “Peran Indonesia Dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),” diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/peran-indonesia-dalam-pbb-perserikatan-bangsa-bangsa/>
- Setnasasean.id (2020) “Urgensi Peran Indonesia di Indo-Pasifik,” diakses melalui <https://setnasasean.id/news/read/urgensi-peran-indonesia-di-indo-pasifik>
- The United States of America (2002) “National Strategy for Home-land Security” (July). www.whitehouse.gov/homeland/book
- Urbanski, J (2009) “The Present and Expected Changes in Maritime Safety, Security, and Defense Functions,” *International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation*, Volume 3, Number 1, March.
- Wilkins, T. S. (2020) “Searching for a Middle Path: ASEAN and the ‘Indo-Pacific’,” (*JIIA*) *the Japan Institute of International Affairs*, Policy Brief, Feb